

**ANALISIS PERANAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN  
PERENCANAAN PARTISIPATIF DI BAPPEDA  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**TESIS**

**OLEH:**

**ISKANDARSYAH  
NPM. 161801095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**ANALISIS PERANAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN  
PERENCANAAN PARTISIPATIF DI BAPPEDA  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH:**

**ISKANDARSYAH  
NPM. 161801095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan  
Perencanaan Partisipatif Di Bappeda Kabupaten Aceh  
Timur**

**N a m a : Iskandarsyah**

**N P M : 161801095**

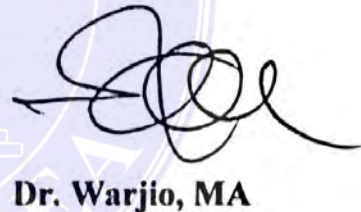
**Menyetujui**

**Pembimbing I**



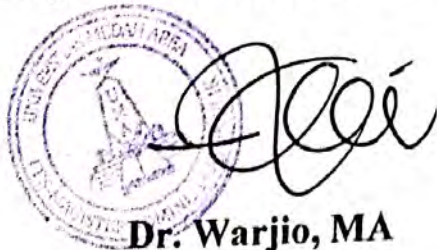
**Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Pembimbing II**



**Dr. Warjio, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada tanggal 26 Mei 2018**

**N a m a : Iskandarsyah**

**N P M : 161801095**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**  
**Sekretaris : Drs. Kariono, MA**  
**Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Warjio, MA**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/20/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,



**Iskandarsyah**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan Rahmat dan segala kemudahan-Nya sehinggasyadapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direkturPascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Warjio, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
6. Terima kasih untuk rekan kerja, Dr. Darmawan, M. Ali, Mohd. Oriza, Kahar Fajri, ST, MT, yang telah memberikan motivasi peneliti dalam penyusunan tesis ini.

8. Terima kasih juga buat teman-teman seangkatan Magister Administrasi Publik 2016, Muhammad, Abdul Makam, Usman, Iskandar113, Heri Setiawan, Lily, M. Iqbal, M. Suryasyah, Ahsani Taqwym, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya, AyahandaAlm. Alamsyah dan Ibunda Nuraini yang sangat saya sayangi, untuk segala investasi hidup yang telah diberikan, terima kasih atas kesediaannya menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Kepada Istri saya, Yulia Kona, SKM terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah di berikan. Dan kepada anak-anak saya tersayang, Farah Azzara, Aoura Shaqira, Shafiq Aqila dan Raffaza yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun. Juga buat kedua Mertua saya, Ayah Yusri dan Ibu Jamilah yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. WassalamualaikumWr.Wb.

Medan, Mei 2018

Peneliti

## ABSTRAK

### ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI BAPPEDA KABUPATEN ACEH TIMUR

**Nama** : Iskandarsyah  
**NPM** : 161801095  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Warjio, MA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemerintahan didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. Yang menjadi kendala Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah (1) penyesuaian atau kesiapan anggaran. (2) usulan yang terlalu banyak. (3) keterbatasan dokumen penunjang. Serta faktor lainnya yang disebabkan adanya keterbatasan dalam pengadaan dokumen-dokumen penunjang berlangsungnya forum perencanaan pembangunan partisipatif. Untuk mengoptimalkan di perlukan kesadaran bagi semua SKPD mengenai rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda guna meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dan di perlunya ketegasan atau sanksi terhadap SKPD yang mengindahkan rapat koordinasi sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis (1) Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. (2) faktor yang menjadi kendala terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif di Bappeda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

**Kata Kunci:** Analisis, Perencanaan Pembangunan, Partisipatif, Bappeda.



## ABSTRACT

### PLANNING ANALYSIS OF PARTICIPATIVE DEVELOPMENT IN BAPPEDA DISTRICT EAST ACEH

**Name** : Iskandarsyah  
**NPM** : 161801095  
**Study Program** : Master of Science in Public Administration  
**Supervisor I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Supervisor II** : Dr. Warjio, MA

Regional Development Planning Board (Bappeda) has a very important role in regional development planning, because this institution is responsible for the implementation of regional development in accordance with the authority it has. Governance in carrying out development in the region, first planned so that development can run well as expected. Therefore, the establishment of a development planning agency in the district of East Aceh is indispensable in carrying out development equally with the broadest autonomy. The obstacles of Bappeda in the participatory development planning process are (1) budget adjustment or readiness. (2) too many proposals. (3) limitations of supporting documents. And other factors caused by the limitations in the procurement of documents supporting the development of participatory development planning forum. To optimize the need for awareness for all SKPD on coordination meetings conducted by Bappeda to improve understanding of the coordination mechanisms of development planning in East Aceh District and on the need for assertiveness or sanctions to SKPD that ignores coordination meetings so that the effectiveness and efficiency of the implementation of development planning can work well. The purpose of this research is to analyze (1) Bappeda in participatory development planning process. (2) factors that become obstacles to participatory development planning process in Bappeda. This study used descriptive qualitative method. The sample in this study amounted to 5 people. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation. After the data obtained then analyzed by using data reduction, data presentation and verification.

**Keywords:** Analysis, Development Planning, Participatory, Bappeda.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perencanaan Pembangunan .....	11
2.1.1. Definisi Perencanaan Pembangunan .....	11
2.1.2. Tujuan Fungsi Perencanaan Pembangunan .....	11
2.1.3. Jenis Perencanaan Pembangunan .....	12
2.1.4. Tahapan Perencanaan Pembangunan .....	13
2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	15
2.3 Pemerintahan Daerah .....	16
2.4 Teori Kebijakan Publik .....	17
2.4.1. Kebijakan Publik Dalam Perencanaan .....	19
2.5 Keterlibatan Pemerintah atau Negara .....	24
2.5.1. Pendekatan Dalam Perencanaan .....	26
2.5.2. Aspek Koordinasi Perencanaan .....	27
2.5.3. Tahapan Perencanaan Pembangunan .....	28

2.6 Kerangka Pemikiran.....	30
2.7 Daftar hasil jurnal penelitian Nasional.....	31
2.8 Daftar hasil jurnal penelitian Internasional.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	35
3.2.2. Waktu Penelitian.....	36
3.3 Populasi Dan Sampel .....	36
3.3.1. Populasi.....	36
3.3.2. Sampel.....	37
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
3.6.1. Reduksi Data .....	41
3.6.2. Penyajian Data .....	41
3.6.3. Verifikasi .....	41

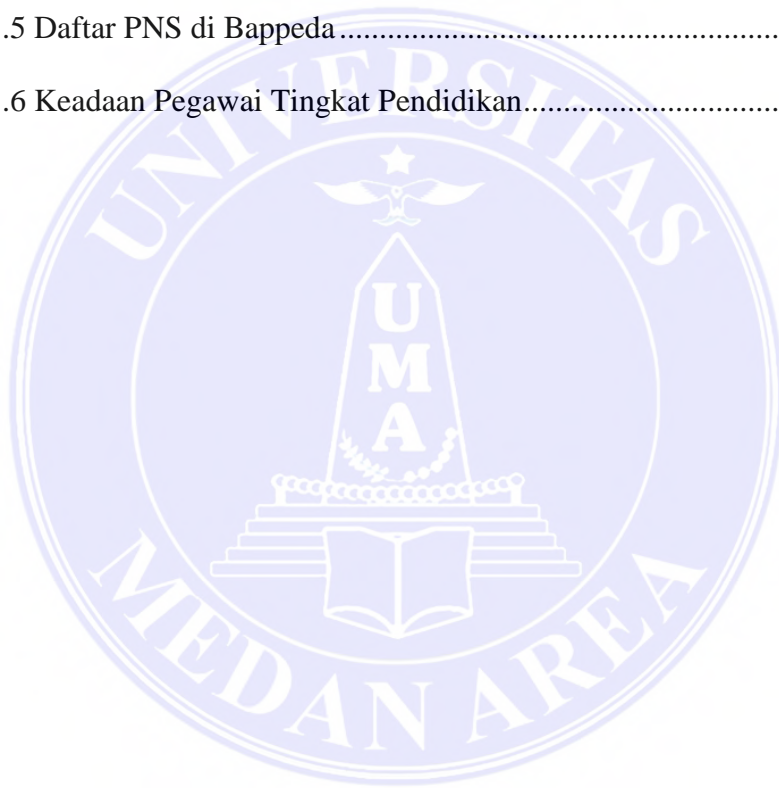
### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi .....	42
4.1.1. Kondisi Geografis .....	42
4.1.1.1 Letak & Batas Wilayah .....	42
4.1.1.2 Batas Wilayah .....	43
4.1.1.3 Keadaan Topografi.....	44
4.1.1.4 Visi Misi Kab. Aceh Timur.....	45
4.1.1.5 Pemda Kab. Aceh Timur.....	46
4.2 Gambaran Umum Bappeda .....	51
4.2.1. Visi Misi Bappeda Kab. Aceh Timur.....	52
4.2.2. Tupoksi Bappeda Kab. Aceh Timur .....	55
4.2.3. Struktur Organisasi Bappeda .....	56

4.2.4. Rincian Tupoksi Jabatan .....	59
4.2.4.1 Tugas Sekretaris .....	60
4.2.4.2 Tugas Bidang Ekonomi .....	60
4.2.4.3 Tugas Bidang Perencanaan .....	61
4.2.4.4 Tugas Bidang Sarana & Prasarana .....	62
4.2.4.5 Tugas Bidang Pengembangan .....	63
4.2.5. Keadaan Pegawai Bappeda .....	64
4.3 Perencanaan Pembangunan Di Kab. Aceh Timur .....	67
4.3.1. Proses Penyelenggaraan Musrenbang .....	68
4.3.1.1 Musrenbang Gampong .....	69
4.3.2. Musrenbang Kecamatan .....	76
4.3.3. Forum SKPD Kab. Aceh Timur .....	83
4.3.4. Musrenbang RKPD Kab. Aceh Timur .....	91
4.4 Bappeda Dalam Perencanaan .....	97
4.5 Faktor-faktor Kendala Bappeda .....	105
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	112
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya .....	41
Tabel 1.2 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Internasional Sebelumnya.....	43
Tabel 1.3 Jumlah Sampel di Bappeda.....	47
Tabel 1.4 Batasan wilayah Kab. Aceh Timur .....	54
Tabel 1.5 Daftar PNS di Bappeda.....	64
Tabel 1.6 Keadaan Pegawai Tingkat Pendidikan.....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seriring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa

daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua mata dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara. Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa di dasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional. Pembangunan makro menurut Ginanjar Katrtasasmitha (2006), mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Dalam pendapat tersebut terkandung suatu pengertian bahwa pembangunan sektoral yang memfokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, ekonomi dan sebagainya, dan pembangunan regional yang menekankan pada pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tertentu, pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana di kemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi, “kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” (Prisma, 2006:49). Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap

pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan *political will* yang tinggi untuk memberikan kewenangannya kepada daerah.

Di pihak lain, daerah baik masyarakat maupun pemerintahnya harus benar-benar mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya tersebut dengan baik, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggali potensi-potensi yang di miliki secara optimal dengan tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Maka untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, maka yang sangat penting di perhatikan pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, baik di pusat maupun di daerah khususnya di daerah pedesaan. Sebab kita lihat sesuai dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air. Memang sudah hal yang wajar apabila pemerintah saat ini lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah khususnya daerah kabupaten untuk memacu pembangunan daerah yang masih tertinggal. Alasan Pemerintah juga menyadari hal ini, terbukti dengan program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitik beratkan pelaksanaan



pembangunan di daerah Kabupaten sampai dengan pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 lalu disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana melalui Undang-Undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah khususnya pemerintahan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV Tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah atau perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat agar peranan Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan

pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 tentang pembentukan Bappeda Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Artinya, untuk daerah Kabupaten Aceh Timur berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang

hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana proses pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan Bappeda Pemda Kabupaten Aceh Timur terhadap pembangunan daerah? Tentu perencanaan pembangunan daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda mestilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, salah satu proses yang mewartakan hal tersebut adalah dengan diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa/Kelurahan. Sebagaimana dipaparkan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas implementasi pembangunan daerah di Pemkab Aceh Timur, perlu juga disokong dengan sumber daya manusia (SDM) nya, yakni pegawai-pegawai yang ada pada jajaran Bappeda itu sendiri seputar tugas pokok dan fungsinya, hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, sebab SDM

sangat lah berpengaruh, mengingat tanpa SDM maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Aceh Timur dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Timur mustilah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan Aceh Timur dirasakan belum maksimal dan merata. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab nya, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat agar peranan Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi Bappeda serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Bappeda Kabupaten Aceh Timur”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif di Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
2. Kendala yang di hadapi dalam proses perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif di Bappeda Kabupaten Aceh Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif di Bappeda Kabupaten Aceh Timur?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan partisipati di Bappeda.
2. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perencanaan Pembangunan**

##### **2.1.1 Definisi Perencanaan Pembangunan**

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi. Arthur W. Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Jensen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya (Riyadi 2002:8).

##### **2.1.2 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya



perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, tujuan dan fungsi pokok tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

### **2.1.3 Jenis Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincolin Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang
- b. Perencanaan Jangka Menengah
- c. Perencanaan Jangka Pendek

Pengertian dari masing-masing jenis Perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10 25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara.

Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik Nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

## 2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

## 3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

#### **2.1.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan**

##### **1. Tahap Penyusunan Rencana**

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik Bappenas untuk tingkat Nasional dan Bappeda untuk tingkat Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

##### **2. Tahap Penetapan Rencana**

Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

### 3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

### 4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.

## 2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda

RI, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”. Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

### **2.3 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan

dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom yakni: “Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.

## 2.4 Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures*, *complex side effects*, *motivation failures*, *rentseeking*, *second best theory*, *implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen,

proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagaiberikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.



4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

#### **2.4.1 Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Menurut William Dunn (2000:1), memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, Dunn (2000:131) menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam membuat analisis kebijakan publik, seorang

analisis akan melalui tahap-tahap kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2000), yaitu:

1. Merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yaitu kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Meramal masa depan kebijakan. Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Didalamnya terkandung informasi mengenai aksi-aksi kebijakan, konsekuensi di masa depan setelah melakukan alternatif tindakan, dan selanjutnya ditentukan alternatif mana yang akan dipilih.

Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta

APBN/APBD berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas(Budimanta:2005).

Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan Desa, musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota dan musrenbang Provinsi guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang. Jika ditinjau dari proses kebijakan publik ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah:

- a. Perumusan masalah
- b. Perumusan agenda (agenda setting)
- c. Perumusan usulan
- d. Pengesahan usulan

Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang Desa dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan masukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi mereka untuk dibawa ke tingkat musrenbang Kelurahan lalu musrenbang Kecamatan dan selanjutnya akan ke Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun musrenbang Negara yang selanjutnya diproses untuk menjadi agenda pemerintah. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan usulan-usulan yang disesuaikan dengan kepentingan politik dan pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya setelah tahapan legisasi kepada pemerintah atau DPR/DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan atau Undang-Undang (Sugandhy, Aca & Rustam Hakim: 2007).

Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengerti tentang Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga diharapkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yaitu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dan masyarakat juga tentunya harus paham apa fungsi partai-partai politik yang dipercayakan masyarakat untuk duduk di DPR atau DPRD, bahwa setiap parpol harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat paling tidak bisa memberikan contoh pada masyarakat tentang pendidikan politik yang baik, juga bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi agar bisa segera menjadi agenda

pemerintah. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur:

1. Jalur Musrenbang, dimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
2. Jalur Politik atau Partai Politik, dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.
3. Jalur Birokrasi, bisa dilakukan melalui SKPD atau langsung pada kepala daerah.

Namun aspirasi masyarakat kita masih dianggap lemah atau monoton pada kontribusinya dalam perencanaan pembangunan, hal ini di sebabkan karena belum pahamiannya masyarakat pada kebutuhan mereka sendiri, seharusnya disinilah peran anggota dewan yang terhormat itu di fungsikan, mereka harus bisa terus mendampingi masyarakat dalam memilih kebijakan pembangunan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kita bersama. Adapun masyarakat yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya untuk dimasukan menjadi kebijakan publik pada perencanaan pembangunan tapi terkendala akan konsep-konsep, aturan, atau prosedur yang ada pada pemerintahan (Wahab, Solichin Abdul:2001). Disini lah perlunya pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum, sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah (Winarno, Budi:2007).

## **2.5 Keterlibatan Pemerintah atau Negara Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat (negara) tersebut. Pada masyarakat liberalis pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak ikut campur tangan kegiatan-kegiatan masyarakat, pemerintah atau negara hanya menjaga ketertiban dan keamanan warganya. Namun pada negara-negara sosialis, falsafah masyarakatnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam masyarakat bangsa tersebut. Peranan dan fungsi pemerintahan juga seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomis material dan terpengaruh dari banyak sedikitnya sumber-sumber kekayaan alamnya. Pada negara yang baru berkembang diperlukan peranan pemerintah yang lebih besar sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan. Menurut Irving Swerdlow yang

dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam buku Pengantar Administrasi Pembangunan (2005) bahwa cara pelaksanaan peranan pemerintah sebagai *involvement* atau campur tangan dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (*operations*): Pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan sendiri.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): Penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain) penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang *action laden* (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain).
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): Cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*). Disini dilakukan cara persuasi dan nasihat. Misalnya para petani supaya masuk KUD.
5. Pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*). Merupakan bentuk *involvement* yang paling ringan, misalnya memberikan informasi atau menjelaskan kebijaksanaan pemerintah.

Pada kasus Negara Indonesia, seperti telah dikemukakan pada pembahasan awal, bahwa secara filosofis kewajiban negara untuk negara atau pemerintah untuk memajukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, ketentraman seluruh rakyat secara merata atau seimbang. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

Untuk itu pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan ke arah tersebut yang dinamakan proses pembangunan. Proses pembangunan tersebut didahului dengan perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan.

### **2.5.1 Pendekatan Dalam Perencanaan**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Beberapa pendekatan dalam perencanaan pembangunan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas:

1. Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan presiden atau gubernur atau bupati secara langsung adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih mereka berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.



2. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan partisipatif, berarti melibatkan semua *stakeholders* pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan bawah-atas dan atas-bawah, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana pembangunan diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Permendagri No. 54 Tahun 2010).

#### **2.5.2 Aspek Koordinasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

1. Aspek fungsional. Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan, antara satu instansi dengan instansi lain, antara setiap tahap perencanaan, dan antara program atau kegiatan pada suatu wilayah dengan wilayah lain.
2. Aspek formal. Adanya kaitan antara program atau kegiatan yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran dan petunjuk dari tingkat nasional.
3. Aspek struktural. Adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap instansi yang bersangkutan.
4. Aspek material. Adanya kaitan dan koordinasi antara program atau kegiatan intra dan antar instansi.

5. Aspek operasional. Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi maupun kebutuhan material.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah seyogyanya mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000: Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

### 2.5.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain, melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Analisis dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang meliputi:

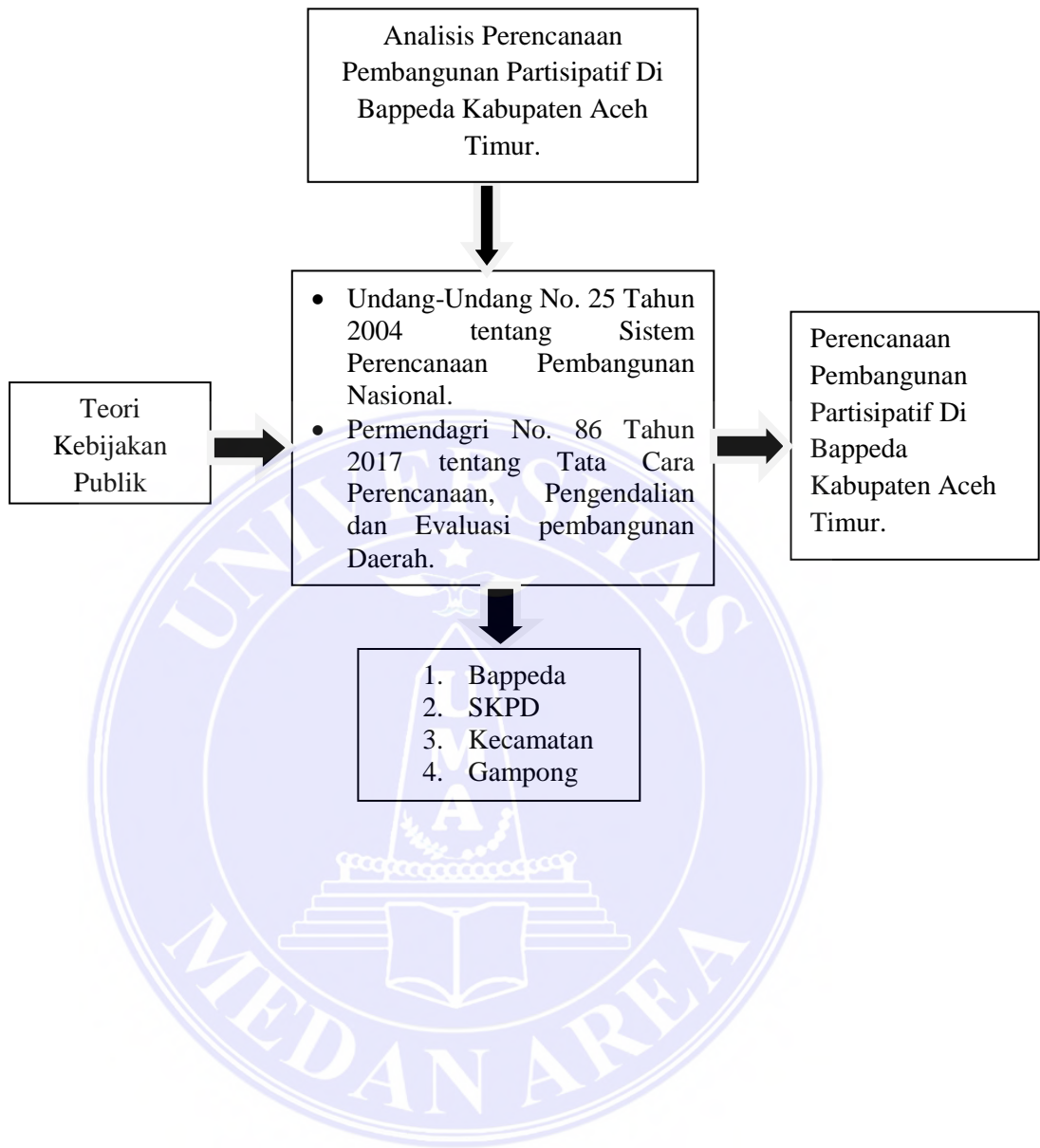
- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil atau manfaat

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

### Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual



**Tabel 1.1. Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya**

No	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda ULU). (eJournal Administrasi Negara. Setio Rini. Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2016).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan.	Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Samarinda ULU. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu menurut hasil penelitian penulis belum berjalan secara optimal. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu sejauh ini sudah baik.	Kepada pemerintah Kota Samarinda dan BAPPEDA Kota Samarinda diharapkan dimasa yang akan datang agar mampu dan berani untuk melaksanakan pembangunan yang benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan cara menyerap usulan masyarakat melalui musrenbang sebesar 50%. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Harus menjadi pilar utama untuk menjadi Badan yang Profesional dan Aspiratif didalam melaksanakan perencanaan makro strategis daerah berdasarkan data serta realita yang dihadapi masyarakat.
2	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur. (eJour	Permasalahan lain yang sering muncul di lapangan adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bukanlah rencana	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, dengan melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian kualitatif	Peranan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara	Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional melaksanakan perencanaan makro strategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan yaitu

	<p>nal Administrasi Negara. Muhamad Chandra Gustama Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2013).</p>	<p>yang kontinue sebab hanya dipersiapkan lima tahun sekali. Seperti halnya dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), perencanaan tersebut tidak menjelaskan <i>output</i> dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran, kendati definisinya secara umum sebagai program pembangunan. Masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i> terintegrasi.</p>	<p>adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.</p>	<p>fungsional berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan perannya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusianya.</p>	<p>berupa data dan fakta mengenai realita persoalan yang tengah dihadapi Kab. Kutai Timur saat ini dan masa yang akan datang. Bappeda harus mampu menanggulangi kendala yang dihadapi dengan cara melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia untuk mengisi kedudukan eselon demi kelancaran pelaksanaan peran Bappeda dalam pencapaian visi Kab. Kutai Timur.</p>
3	<p>Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado. (Jurnal Administrasi Negara, Cindy Ratu. 2009).</p>	<p>Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan</p>	<p>Objek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado dengan berfokus pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA serta bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Manado. Deskriptif kualitatif yaitu sebagai pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan atau subjek</p>	<p>Pemerintahan Kota Manado mempunyai tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan</p>	<p>Agar sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan lenih berhasil dan berdaya guna maka perlunya BAPPEDA mengadakan analisa dan evaluasi, hal-hal yang perlu adalah: Upaya memperbaiki yang belum sempurna. Upaya menggali, meningkatkan serta memanfaatkan potensi yang ada. Upaya menciptakan yang belum ada, kesemuanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk</p>

		perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang yang nampak atau sebagaimana adanya. Teknik observasi, wawancara, teknik analisa data, teknik dokumentasi.	seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan instansi vertikal yang ada di daerah Kota Manado. Hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota Manado adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan dalam melakukan pekerjaan.	mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kota Manado supaya meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan Instansi Vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
--	--	---	---	---	---

**Tabel 1.2 List of Previous International Research Journals**

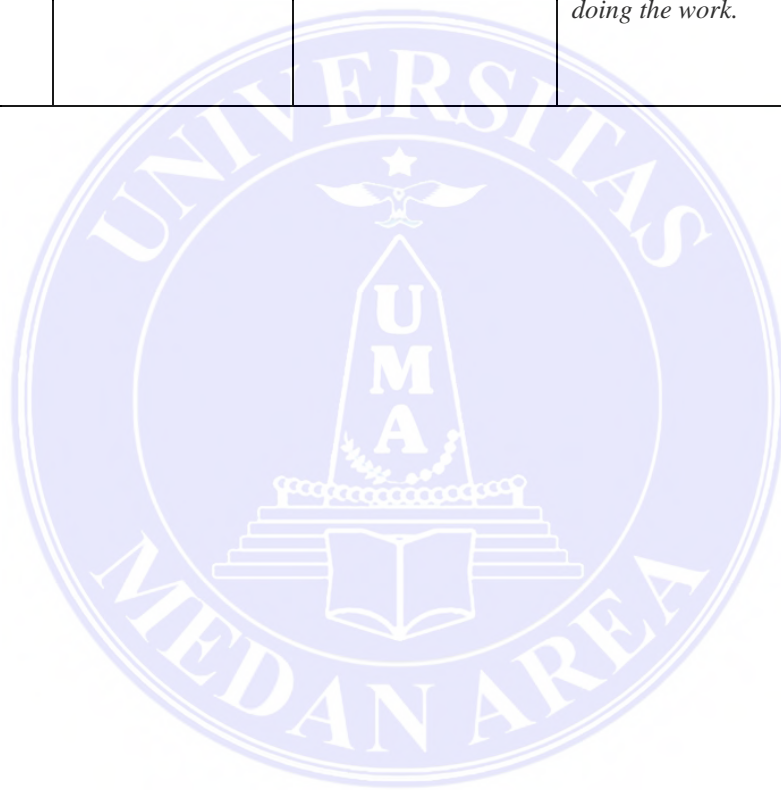
<i>Nu</i>	<i>Title</i>	<i>Issues</i>	<i>Research Methods</i>	<i>Research Results</i>	<i>Advice</i>
1	<i>The Role of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Samarinda City in the Kecamatan Development Planning Meeting (Study in Samarinda Subdistrict ULU). (eJournal of</i>	<i>Regional Development Planning Board is very instrumental in running regional autonomy. In carrying out its functions as a Regional Development Planning Agency, BAPPEDA is required to play an active, effective and efficient role in laying the basic framework of</i>	<i>Using descriptive research with qualitative approach. Data source from informant, document. Research location in Subdistrict Samarinda ULU. Techniques of collecting interview data, observation, documentation. Data analysis method using qualitative data analysis is data collection, data condensation, data</i>	<i>The role of the Regional Development Planning Board of Samarinda City as a facilitator in Musrenbang District in Samarinda Ulu Subdistrict according to the results of the study authors have not run optimally. The role of the Regional Development Planning Board of Samarinda City as</i>	<i>To the government of Samarinda City and BAPPEDA of Samarinda City, it is expected that in the future to be able and courageous to carry out the right development based on the aspirations of the community by absorbing the society proposal through musrenbang by 50%. The APBD should be able to present information</i>



	<i>State Administration Setio Rini State Administration, Faculty of Social and Political Sciences Mulawarman University, 2016).</i>	<i>development in a robust region in order to realize the success of development.</i>	<i>presentation &amp; conclusion.</i>	<i>the Coordinator in Musrenbang Kecamatan in Samarinda Ulu Sub-district has been good.</i>	<i>openly and easily accessible to the public. Must be the main pillar to become a Professional and Aspirational Body in implementing regional strategic macro planning based on data and reality faced by society.</i>
2	<i>Role of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) In Development In East Kutai Regency. (eJournal of State Administration Muhammad Chandra Gustama State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University,</i>	<i>Another problem that often arises in the field is the National Development Program (Propenas) and Regional Development Program (Propeda) is not a continuous plan because it is only prepared five years. As with the Basic Pattern of Regional Development (Poldas), the plan does not explain outputs and outcomes and is unrelated to the budget, despite its</i>	<i>This research is located in East Kutai Regency, by conducting research in Regional Development Planning Board (Bappeda) of East Kutai Regency. Qualitative research method is a method used to examine the condition of natural objects, where researchers are key instruments and the results of research more emphasis on the meaning than Techniques of collecting interview data, observation, documentation.</i>	<i>The role of BAPPEDA of East Kutai Regency in the process of regional development is also very decisive because to carry out the duties and functions BAPPEDA of East Kutai Regency functionally plays an active role as planner, coordinator and also as controller of implementation as well as researcher and development of regional development such as preparation of Long Term Development Plan , Medium Term Development Plan and Strategic Plan of</i>	<i>Bappeda should be able to become the main pillar, which professionally execute regional strategic macro planning based on various data and information needed that is in the form of data and facts about reality of problem facing Kab. East Kutai now and in the future. Bappeda must be able to overcome obstacles encountered by way of recruitment of Human Resources to fill the position of esselon for the smooth implementation of</i>

	2013)	<i>general definition as a development program. There is still no clarity as to how and when top-down and bottom-up planning is integrated.</i>		<i>Regional Device Work Unit. In carrying out its role, Bappeda still faces obstacles, especially on its human resources.</i>	<i>the role of Bappeda in achieving the vision of Kab. East Kutai.</i>
3	<i>The role of the Regional Development Planning Board (BAPPEDA) In Pengelenggaraan Development In Manado City. (Journal of State Administration, Cindy Ratu, 2009).</i>	<i>Regional development planning should be supported by the equitable and sustainable implementation of regional government with a developmental direction well planned and dynamic, of course also the main tasks and functions of BAPPEDA institutions must be consistent with the commitment to what is mandated by prevailing laws and regulations, and is strongly influenced by the participation of the community as well as elements in the community which</i>	<i>The object of this research is the Regional Development Planning Board of Manado City by focusing on the position, the main tasks and functions of BAPPEDA and how its implementation in the implementation of development in Manado City. Descriptive qualitative ie as the problem solvers are investigated by describing the circumstances or subject or object of research of a person, institution, community, and so on present or visible. Observation techniques, interviews, data analysis techniques,</i>	<i>Manado City Government has the main duty stipulated in the Regional Regulation concerning the formation of organization and Working Procedures of Regional Government that is implementing the preparation and implementation of regional policy in the field of regional development planning, research, development and statistics. Spatial planning, poverty alleviation and coordinating all development plans with service and the existing vertical institutions in the city of Manado. Obstacles in the</i>	<i>In order for development targets to be implemented that will be successful and efficient, the need for BAPPEDA to conduct analysis and evaluation, the things that need to be: Improving efforts that have not been perfect. Efforts to explore, improve and utilize existing potential. Creating efforts that do not yet exist, all of them to achieve that goal expected. To achieve integrated, targeted and targeted regional development, BAPPEDA Manado City to improve coordination with Vertical Agency and Institutions in the</i>

		<i>are directly or indirectly involved in governance.</i>	<i>documentation techniques.</i>	<i>implementation of the task of Manado City BAPPEDA is the lack of facilities and infrastructure. With an inadequate equipment will be able to inhibit the smooth activities in doing the work.</i>	<i>area through planning, monitoring and evaluation of the development that has been implemented.</i>
--	--	---	----------------------------------	--	---



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaandan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif di Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang beralamat diSeuneubok Teungoh (Pr), Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24454. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karenaingin menganalisa lebih jauh bagaimana tugas pokok dan fungsi serta peranan sebagai lembaga teknisd daerah

yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam bidang pembangunan perencanaan partisipatif daerah.

### 3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018

Aktifitas	Bulan															
	Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■															
Seminar Perbaikan Proposal					■											
Pengumpulan Data									■							
Analisis Data													■			
Penulisan Tesis													■			

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposivesampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Timur
- b. SKPD Kabupaten Aceh Timur
- c. Keuchik

### 3.3.2 Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti berpedoman kepada pendapat Sugiyono (2010:Patton 1990), yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada kriteria berapa banyak jumlah yang harus di wawancarai. Peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi jenuh, artinya sampai peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang diteliti. Patton 1990 memberikan penjelasan yg sangat lugas. Tidak ada aturan mengenai jumlah responden atau *informan* dalam penelitian kualitatif. Maka jumlah sampel sebanyak 5 orang.

**Tabel 3.3. Jumlah sampel di kantor Badan Perencanaan Pembangunan**

No.	Sampel	Nama Sampel	Jumlah Sampel
1	Informan Kunci	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Timur	1
2	Informan Utama	SKPD Kabupaten Aceh Timur	3
3	Informan Tambahan	Keuchik	1
	Jumlah		5

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih

adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Timur.
2. Informan utama, SKPD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 3 orang.
3. Informan tambahan, Keuchik.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Bappeda Kabupaten Aceh Timur, SKPD Kabupaten Aceh Timur dan Keuchik yang dapat memberikan informasi.

Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Bappeda Kabupaten Aceh Timur untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan partisipatif dalam pembangunan daerah.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian(Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Bappeda Kabupaten Aceh Timuryang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu



identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Bappeda Kabupaten Aceh Timur. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada pada kantor Bappeda Kabupaten Aceh Timur, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan

yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

### **3.6.1 Reduksi Data**

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

### **3.6.3 Verifikasi**

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis serta data-data dari observasi peneliti maupun wawancara yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dari aspek penyerasian jadwal kegiatan yang berada dalam kategori kurang baik karena kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur Bappeda dengan unsur Instansi terkait, aspek memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan sudah berjalan dengan baik terlihat dari beberapa SKPD telah memadukan kegiatan atau programnya yang sejenis dan berkaitan sudah berjalan dengan baik terlihat dari beberapa SKPD telah memadukan kegiatan atau programnya yang sejenis atau berkaitan, aspek mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi sudah berjalan dengan baik dimana sudah ada identifikasi terhadap SKPD, aspek evaluasi perencanaan sudah berjalan baik dimana selain mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan Musrenbang serta analisis dalam melihat inkonsistensi identifikasi permasalahan sebelumnya dan terakhir aspek memberi petunjuk dan bimbingan sudah berjalan baik dimana adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang di adakan Bappeda dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur. Partisipasi Instansi dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur juga berjalan dengan baik dapat dilihat dari aspek pemahaman

koordinasi perencanaan sudah terlaksana dimana adanya penjelasan langsung pihak Bappeda, aspek kepatuhan terhadap petunjuk dan bimbingan sudah baik dimana rata-rata SKPD sudah patuh terhadap bimbingan yang telah dilaksanakan, dan dari aspek keaktifan mengikuti rapat koordinasi juga sudah berjalan dengan baik atau sudah aktif dimana instansi merasa rapat koordinasi merupakan hal penting bagi pembangunan Kabupaten Aceh Timur.

2. Adapun kendala yang di hadapi Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di rangkum dalam beberapa faktor sebagai berikut:

a. Penyesuaian atau kesiapan anggaran

Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. Kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu di biayai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

b. Usulan yang terlalu banyak

Pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada Musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. Dalam Perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur tidak terlepas dari proses pemilihan begitu banyak usulan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya terkadang

penyaringan usulan kegiatan tersebut menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri.

c. Keterbatasan dokumen penunjang

Dalam pelaksanaan forum Musrenbang, salah satu yang menjadi hal penunjang kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri, baik itu peserta, narasumber kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Seperti pada sebagian besar forum Musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan di Kabupaten Aceh Timur, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada forum Musrenbang Gampong, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan Gampong, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan Gampong pada tahun sebelumnya.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya upaya komunikasi yang baik antara pihak Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dengan Instansi lainnya dalam memaksimalkan peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
2. Perlunya kesadaran bagi semua SKPD mengenai rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda guna meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur sehingga

nantinya tidak lagi tumpang tindih kegiatan atau kebijakan antara Bappeda dengan para SKPD.

3. Perlunya ketegasan atau sanksi terhadap SKPD yang mengindahkan rapat koordinasi sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahman dkk. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan* Malang, Averroes Press, 2009.
- Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, 2001.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press: Yogyakarta. 2003.
- Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. 2008.
- Edmund M, Burke. *Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota* : Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*  
:PPM, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT  
RemajaRosdakarya,2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana  
PrenadaMedia Group, 2006.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi  
danEvaluasi*.Jakarta: Gramedia, 2004.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas  
denganPemilihanKepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers, Jakarta  
2011.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta :PT.  
RajaGravindo Persada, 2014.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis  
Kebijakan*,Yogyakarta : UNY, 2010.
- Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. *Perencanaan Pembangunan  
DaerahStrategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* :  
PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada  
MediaGroup, 2005.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan  
Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.



Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangkasosialisasi UU.No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit MediaPressindo, 2002.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah.

Non Buku:

<http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/-perencanaan-pembangunan-daerah>.(di akses pada tanggal 10 Januari 2018. 15:45 WIB)

<http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek>.  
(di akses pada tanggal 13 Januari 2018. 20:50 WIB)

<http://pkmk-lanri.org/2013/02/18/pengembangan-perencanaan-dalam->

[perumusan-kebijakan-publik](#).(di akses pada tanggal 18 Januari 2018. 11:55

WIB)

